



Manajemen Keuangan Sekolah di MI Darul Hikmah Entalsewu Sidoarjo

Dina Puspita Ningsih^{1*}, Ahmad Hariyadi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Sarirogo No.1, Sidoarjo

Korespondensi penulis: 40dinapus@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the financial management at Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Hikmah Entalsewu. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the financial management at MI Darul Hikmah Entalsewu is carried out through three main stages, namely planning, implementation, and evaluation. At the planning stage, the madrasah comprehensively prepares the financial budget by involving stakeholders. The main source of funding comes from the government's School Operational Assistance (BOS) funds and voluntary contributions/donations from students. In the implementation stage, the madrasah meticulously records each receipt and expenditure of funds, then allocates the funds according to the operational needs of the madrasah and the needs of the students. Furthermore, in the evaluation stage, internal parties (the principal and the foundation) as well as external parties (the Ministry of Religious Affairs) are involved in the supervision, monitoring, and accountability of the use of funds. Through this comprehensive financial management process, the financial management at MI Darul Hikmah Entalsewu is carried out in a transparent, accountable, and compliant manner with the applicable regulations. The findings of this research can be a reference for other madrasahs in implementing effective financial management.*

Keywords: *Budget Planning, Elementary Madrasah, Financial Management.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen keuangan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Hikmah Entalsewu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan di MI Darul Hikmah Entalsewu dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, pihak madrasah menyusun anggaran keuangan secara komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan. Sumber pendanaan utama berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah serta infak/sumbangan dari siswa. Dalam tahap pelaksanaan, pihak madrasah mencatat dengan teliti setiap penerimaan dan pengeluaran dana, kemudian mengalokasikan dana sesuai kebutuhan operasional madrasah dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, pihak internal (kepala madrasah dan yayasan) serta pihak eksternal (Kementerian Agama) terlibat dalam pengawasan, pemantauan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Melalui proses manajemen keuangan yang komprehensif tersebut, pengelolaan keuangan di MI Darul Hikmah Entalsewu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi madrasah lain dalam menerapkan manajemen keuangan yang efektif.

Kata kunci: Manajemen Keuangan, Madrasah Ibtidaiyah, Perencanaan Anggaran

1. LATAR BELAKANG

Aspek keuangan dan pendanaan memainkan peran krusial dalam memberikan dukungan langsung terhadap efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan. Artinya, sumber daya keuangan dan pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan dalam memastikan bahwa pengelolaan pendidikan berjalan dengan baik dan efisien. Dalam konteks ini, keuangan dan pembiayaan mengacu pada alokasi dana dan sumber-sumber finansial yang digunakan dalam kegiatan operasional sekolah.

Manajemen pembiayaan dan keuangan melibatkan serangkaian kegiatan yang penting dan substansial dalam pengelolaan dana di lembaga pendidikan. Proses manajemen ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian. Dalam perencanaan, lembaga pendidikan merencanakan penggunaan dana secara efektif dan efisien. Pengorganisasian melibatkan pengaturan dan pengelompokan sumber daya keuangan yang ada. Pengarahan berhubungan dengan mengarahkan penggunaan dana sesuai dengan prioritas dan tujuan lembaga. Pengkoordinasian melibatkan koordinasi yang baik antara berbagai unit atau departemen dalam pengelolaan keuangan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian melibatkan penerapan mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan atau pemborosan dana.

Manajemen pembiayaan dan keuangan menjadi sangat penting karena lembaga pendidikan tidak dapat eksis atau beroperasi tanpa pembiayaan yang kuat. Dana yang cukup dan terkelola dengan baik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional, fasilitas, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan berbagai kegiatan pendidikan lainnya. Tanpa pembiayaan yang memadai, lembaga pendidikan akan menghadapi berbagai kendala dalam menyediakan fasilitas yang memadai, menyelenggarakan program pembelajaran yang berkualitas, dan memenuhi kebutuhan siswa dan staf.

Dalam konteks ini, masalah keuangan menjadi salah satu hal yang sangat mendasar di sekolah atau madrasah. Semua kegiatan pendidikan yang dilakukan di lembaga tersebut sangat terkait erat dengan manajemen keuangan sekolah. Misalnya, dana yang diperoleh harus dialokasikan dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan pembelian buku teks, peralatan, dan bahan ajar. Penggajian guru dan staf juga harus terkendali dengan baik. Selain itu, manajemen keuangan sekolah juga melibatkan pengelolaan pendapatan dari sumber-sumber seperti biaya pendaftaran siswa, sumbangan dari masyarakat, atau program kemitraan dengan pihak luar.

Namun pada praktiknya masih banyak sekolah maupun madrasah yang belum secara efektif dan efisien mengelola keuangan pendidikan sesuai dengan prinsip dan pengelolaan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen keuangan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis didalam rencana strategis lembaga pendidikan. Permasalahan dana atau keuangan pendidikan menjadi salah satunya. Tidak semua lembaga pendidikan bisa

mengelola keuangan atau dana pendidikan dengan baik, karena sejatinya uang yang dikelola harus disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan standar mutu pendidikan.

Upaya pemerintah untuk memberi ruang atas masalah tersebut adalah melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa “pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”. Lebih lanjut, pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud meliputi; penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain selain yang dimaksud yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan peraturan tersebut maka keberlangsungan pendidikan di sekolah/madrasah perlu adanya sumber keuangan yang memadai dan keuangan pendidikan dikelola dengan efektif dan efisien agar proses belajar mengajar, sarana dan prasarana tersedia dengan baik, permasalahan yang menjadi kendala dalam kegiatan belajar mengajar dan berbagai kebutuhan pendidikan bisa terpenuhi, sehingga mutu dan kualitas pendidikan menjadi baik.

Keterbatasan dana seringkali menjadi tantangan dalam dunia pendidikan, dan manajemen keuangan yang baik akan membantu sekolah merencanakan penggunaan dana dengan efektif, serta mencari sumber dana tambahan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pendidikan tersebut. Temuan awal yang di peroleh dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di MI Darul Hikmah Entalsewu beralamatkan di JL Mbah Demang Sosrorejo desa Entalsewu kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, madrasah memiliki keunggulan utama dalam mendasarkan dirinya pada iman dan taqwa. Mutu pendidikan di MI Darul Hikmah Entalsewu tersebut mengacu pada 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pembiayaan, terutama karena mayoritas peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu secara finansial. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik, diperlukan manajemen keuangan yang profesional dalam hal penggalan sumber dana dan pendistribusiannya.

Contoh yang baik dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari MI Darul Hikmah Entalsewu, di mana mereka memiliki sistem pengelolaan keuangan yang tertib dan teratur. Bendahara madrasah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, sedangkan kepala madrasah berperan sebagai pengawas pengeluaran. Dalam menyusun anggaran, baik bendahara maupun kepala sekolah sangat berhati-hati agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengaturan keuangan yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan yang tersedia. Pendistribusian dana dilakukan dengan cermat, dengan memprioritaskan kebutuhan pendidikan. Di MI Darul Hikmah Entalsewu, efisiensi dan efektivitas keuangan sekolah akan menjadi tolak ukur untuk mengukur derajat kesuksesan dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung kegiatan pendidikan. Evaluasi tingkat keberhasilan ini dapat dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan sekolah. Proses perencanaan keuangan sekolah yang baik akan memastikan alokasi dana yang tepat untuk mendukung seluruh aktivitas pendidikan yang menjadi prioritas. Hal ini melibatkan penentuan anggaran yang realistis dan pemetaan kebutuhan dana yang jelas. Selanjutnya, pelaksanaan keuangan sekolah yang efisien akan memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Pengelolaan yang cermat terhadap pembayaran, pengadaan, dan penggunaan dana akan membantu meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari setiap dana yang digunakan.

Dengan demikian, melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan sekolah yang baik, MI Darul Hikmah Entalsewu dapat mengukur tingkat keberhasilan dalam penggunaan dana untuk mencapai tujuan dan meningkatkan mutu pendidikan. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di madrasah tersebut dengan Judul “Manajemen Keuangan Sekolah Di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Entalsewu.”

2. KAJIAN TEORITIS

Manajemen adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris dan memiliki arti pengelolaan. manajemen dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui penggunaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu memanfaatkan orang, uang, bahan, peralatan, dan metode secara efektif. Seperti yang telah diketahui, manajemen melibatkan mengarahkan orang lain melalui serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan, dengan tujuan mencapai hasil yang telah ditetapkan secara

berkelanjutan. Sedangkan dalam konteks keuangan mencakup manajemen dana, investasi, perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, dan analisis keuangan. Dalam konteks sekolah, manajemen keuangan memiliki peran penting sebagai bagian dari manajemen sekolah yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendidikan di dalamnya. Seperti halnya dalam manajemen pendidikan secara umum, manajemen keuangan di sekolah melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi. Dalam lembaga pendidikan atau sekolah, manajemen keuangan dikategorikan menjadi tiga fase. Fase pertama adalah penganggaran belanja, di mana dilakukan perencanaan alokasi dana. Fase kedua adalah pelaksanaan penganggaran dengan melibatkan akuntansi. Fase ketiga adalah evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Melalui evaluasi ini, dilakukan penilaian terhadap penggunaan dana dan pencapaian tujuan. Dengan menjalankan tugas-tugas manajemen keuangan ini dengan baik, lembaga pendidikan atau sekolah dapat memastikan kesehatan keuangan, optimalisasi sumber daya, dan pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan. Pada lembaga pendidikan atau sekolah, inti dari manajemen keuangan terletak dalam beberapa komponen utama, antara lain: prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pengeluaran dana, pengelolaan stok, prosedur distribusi, prosedur investasi, dan prosedur audit. Dalam konteks ini, manajemen keuangan bertujuan untuk mengoptimalkan penggalan dana dengan menggunakan sumber daya secara kreatif dan maksimal, secara transparan dan jujur, mengalokasikan dana dengan cara yang menghasilkan keuntungan atau manfaat yang optimal, serta memiliki kewajiban yang jelas dan obyektif dalam mengelola dana dengan penuh tanggung jawab.

Terdapat tiga sumber dana pendidikan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu : 1)Pemerintah Pusat, 2)Pemerintah Daerah, 3)Dana dari Masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin dalam bukunya Mulyono di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Kabupaten Malang tentang dana-dana yang mengalir ke sekolah dan madrasah adalah sebagai berikut: 1)Bantuan Operasional Sekolah/ Madrasah (BOS). Dana ini bersumber dari pemerintah pusat (APBN) dan hanya diperuntukkan untuk wajib belajar sembilan tahun. 2)Bantuan Khusus Murid (BKM). 3)Bantuan Khusus Guru (BKG). 4)Imbalan Swadaya. 5)School Green (Khusus SMK). 6)Biis Mutu (Khusus SMA). 7)Dana Dikonsentrasi (Dikon). 8)Dana Rehab (Khusus SD/MI). 9)BMI Cabang Malang,10)

Beasiswa BSF (Basic School Foundation). 11) Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. 12) Dana Bantuan Orangtua berupa SPP.

Pada dasarnya, seorang peneliti membangun penelitiannya berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, dan hal yang sama ingin dilakukan oleh peneliti dalam pembuatan artikel ini. Salahsatu penelitian yang menjadi rujukan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh Gufron, (2022) yang berjudul “Startegi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Keuangan Di MA Noer Fadilah Sumber Panjalin Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan melalui proses perundingan yang melibatkan semua anggota sekolah. Teknik alokasi anggaran pendidikan didasarkan pada kriteria yang ditekankan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan. Pengendalian pembiayaan dilakukan secara kontinu terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan di lembaga tersebut. Selain itu, dilakukan pembelanjaan yang sesuai dengan kebutuhan. Kesamaan penelitian di atas terletak pada pembahasan pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaan yang terjadi adalah pada permasalahan yang diteliti. Pada penelitian di atas permasalahan yang diteliti adalah tentang strategi manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah, sementara yang diteliti peneliti adalah berfokus pada pengelolaan keuangan di Madrasah Ibtidaiyah.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan pendekatan studi yang menggambarkan keadaan sosial spesifik dengan menggambarkan realitas secara akurat melalui kata-kata. Metode ini melibatkan pencatatan dan analisis data yang relevan yang diambil dari situasi alami. Studi ini mengadopsi metode riset lapangan, atau yang dikenal juga sebagai penelitian di lapangan (field research). Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan sumber informasi data yang diambil dari situasi di lapangan secara langsung, bukan mengandalkan literatur/bahan pustaka. Guna mendapatkan informasi data yang diperlukan sebagai dasar studi, penulis melaksanakan pengumpulan data melalui tiga metode yang berbeda di lapangan, yaitu : Observasi, Wawancara. dan Dokumentasi. Sebelum menjalankan analisis data apa pun, informasi yang terkumpul dari wawancara utama dan sumber relevan lainnya diverifikasi. Setelah pengumpulan semua data, peneliti akan berusaha menawarkan studi yang metodis, tepat, dan menyeluruh terhadap pokok permasalahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di MI Darul Hikmah Entalsewu, sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah pengawasan Kementerian Agama dan berlokasi di Jl. Mbah Demang Sosrorejo, Desa Entalsewu. Waktu penelitian pada rentang waktu antara bulan Desember hingga Mei pada tahun ajaran 2023/2024. Dengan proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis Peencanaan Keuangan Sekolah di MI Darul Hikmah Entalsewu

Proses perencanaan di MI Darul Hikmah Entalsewu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Tahap awal dalam perencanaan keuangan pendidikan di madrasah ini adalah penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran bertujuan untuk membuat gambaran rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk perkiraan biaya untuk setiap kegiatannya. Anggaran di MI Darul Hikmah Entalsewu berisi rencana penerimaan dan pengeluaran yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan untuk satu tahun ke depan. Dalam proses penyusunan anggaran, pihak madrasah tidak lupa untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.

Perencanaan anggaran di lembaga pendidikan seperti MI Darul Hikmah Entalsewu memiliki fungsi yang kompleks. Berdasarkan pemikiran Mulyasa, fungsi pertama dalam penyusunan anggaran adalah mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan keuangan yang dapat diperoleh oleh madrasah. Selain itu, anggaran juga harus mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional, seperti: 1) Kegiatan belajar mengajar, termasuk penyediaan bahan ajar dan alat pelajaran yang dibutuhkan oleh guru dan siswa. 2) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang proses pembelajaran. 3) Pembayaran honorarium bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas di madrasah. 4) Peningkatan kesejahteraan warga sekolah, termasuk guru dan staf administrasi. Dengan demikian, fungsi perencanaan anggaran tidak hanya terbatas pada memperkirakan total penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga menentukan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lembaga pendidikan, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien..

MI Darul Hikmah Entalsewu telah menerapkan manajemen keuangan sekolah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyono, yaitu dalam peencanaan keuangan sekolah, pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan bendahara, terlibat aktif dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) setiap tahunnya. Penyusunan RKAM didasarkan pada analisis kebutuhan sekolah, baik kebutuhan operasional maupun pengembangan, serta melibatkan komite sekolah dan mempertimbangkan masukan dari guru serta tenaga kependidikan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) di MI Darul Hikmah Entalsewu, melibatkan beberapa pihak kunci, yaitu pengurus yayasan, kepala madrasah, dan bendahara. Proses pengembangan RKAM ini dilakukan melalui pembentukan tim yang bertanggung jawab untuk menentukan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan. Setelah merumuskan rencana kegiatan, tim kemudian menyusun rincian anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing bidang. Usulan biaya dalam RKAM disesuaikan dengan rencana kegiatan yang telah disepakati. Tentunya, dalam perencanaan keuangan ini, pihak madrasah mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas yang sejalan dengan standar pendidikan, serta berdasarkan pada realisasi kegiatan dan anggaran di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, RKAM yang telah disusun harus mendapatkan pengesahan dari kepala madrasah. Setelah proses ini, pihak madrasah melakukan sosialisasi dan memastikan legalitas RKAM tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

Analisis Pelaksanaan Keuangan Sekolah di MI Darul Hikmah Entalsewu

Pelaksanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Entalsewu mencakup kegiatan penerimaan dan pengeluaran. Pelaksanaan manajemen keuangan di MI Darul Hikmah Entalsewu telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme belanja sekolah yang diuraikan dalam teori Mulyono. Sekolah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) setiap tahun dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. RKAM disusun berdasarkan analisis kebutuhan sekolah, baik kebutuhan operasional maupun pengembangan, dan telah mendapat persetujuan dari komite sekolah dan dinas pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelanjaan, setiap pengeluaran di MI Darul Hikmah Entalsewu didasarkan pada RKAM yang telah disahkan. Terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah dalam proses pembelanjaan. Semua pembelanjaan didukung dengan bukti transaksi yang lengkap dan pembayaran dilakukan melalui rekening sekolah. Pencatatan dan pelaporan keuangan di MI Darul Hikmah Entalsewu dilakukan secara rinci dan tertib oleh bendahara sekolah.

Bedasarkan analisis data tentang manajemen keuangan sekolah di MI Darul Hikmah, diketahui bahwa sekolah tersebut kurang memiliki sumber pendanaan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang tidak sesuai dengan teori Mulyono yaitu :1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebagai sekolah swasta, MI Darul Hikmah kemungkinan tidak menerima alokasi dana APBN dan APBD secara maksimal, berbeda dengan sekolah negeri yang mendapatkan pendanaan utama dari sumber-sumber tersebut. 2)Sumbangan Orang Tua Siswa (SPP): Sumbangan orang tua siswa (SPP) menjadi sumber pendanaan utama bagi sekolah swasta seperti MI Darul Hikmah. Namun, jika sekolah tidak dapat menetapkan SPP yang memadai, maka pendanaan sekolah akan terhambat. 3)Donasi dan Sponsor: MI Darul Hikmah perlu mengoptimalkan sumber pendanaan dari donasi dan sponsor untuk menambah sumber pembiayaan sekolah. Namun, sekolah swasta seperti MI Darul Hikmah kemungkinan mengalami kesulitan dalam mencari donasi dan sponsor yang berkelanjutan. 4)Usaha Produktif Sekolah: Sekolah juga dapat mengembangkan usaha-usaha produktif, seperti koperasi sekolah, kantin, atau unit produksi, untuk menambah sumber pendanaan. Namun, kemampuan MI Darul Hikmah dalam mengelola usaha produktif ini mungkin masih terbatas.

Secara keseluruhan, keterbatasan sumber pendanaan yang dimiliki MI Darul Hikmah sebagai sekolah swasta dapat menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sekolah perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang tersedia, seperti meningkatkan Kerja sama dengan Pemerintah, menetapkan SPP yang wajar, serta mengembangkan usaha-usaha produktif untuk menunjang pembiayaan sekolah. Dengan demikian, MI Darul Hikmah Entalsewu perlu mengupayakan penggalan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang lebih variatif. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian dan memaksimalkan anggaran yang tersedia guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang lebih berkualitas di madrasah.

Analisis Evaluasi Keuangan Sekolah di MI Darul Hikmah Entalsewu

Evaluasi keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Entalsewu merupakan kegiatan setelah perencanaan dan pelaksanaan. Berkenaan dengan evaluasi tersebut, di MI Darul Hikmah Entalsewu dilakukan melalui pengawasan dan pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam pengelolaan keuangan di MI Darul Hikmah Entalsewu, pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan juga telah dilaksanakan dengan baik. Kepala sekolah dan komite sekolah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan

RKAM. Selain itu, terdapat audit internal maupun eksternal untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan dana sekolah secara transparan kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di MI Darul Hikmah Entalsewu dapat dikatakan telah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prosedur dan mekanisme belanja sekolah yang diuraikan dalam teori Mulyono. Bentuk pengawasan ini disesuaikan dengan sumber pendanaan yang diterima oleh madrasah. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana.

Pelaksanaan evaluasi di MI Darul Hikmah Entalsewu dilakukan sesuai dengan aturan dan jadwal yang ditetapkan oleh pihak evaluator, baik dari internal madrasah maupun pihak eksternal yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di madrasah dapat terjaga dengan baik. Pengelolaan keuangan di MI Darul Hikmah Entalsewu sejalan dengan pandangan Mustari mengenai jenis pengawasan berdasarkan subjeknya. Terdapat dua bentuk pengawasan yang diterapkan, yaitu 1) Pengawasan internal, yang dilakukan oleh pihak-pihak dari dalam lingkungan madrasah, seperti kepala sekolah, bendahara, dan tim audit internal. 2) Pengawasan eksternal, yang melibatkan pihak-pihak di luar madrasah, seperti pemerintah, lembaga donor, atau auditor independen.

Selain itu, berdasarkan waktu pelaksanaannya, MI Darul Hikmah Entalsewu menerapkan pengawasan yang bersifat berkala. Pengawasan ini dilakukan secara terjadwal dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Penerapan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta pengawasan berkala, bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di madrasah. Hal ini penting untuk menghindari penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana dan memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

Dalam pengelolaan keuangan MI Darul Hikmah Entalsewu, terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah melalui pelaporan keuangan. Hal ini selaras dengan pandangan Tim Administrasi Pendidikan UPI, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak internal, seperti pimpinan madrasah, maupun pihak eksternal yang menjadi

pemangku kepentingan (stakeholder) lembaga pendidikan, seperti pemerintah, donatur, atau masyarakat. Melalui mekanisme pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, MI Darul Hikmah Entalsewu dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dari berbagai sumber. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang manajemen keuangan sekolah di MI Darul Hikmah Entalsewu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Proses perencanaan kurikulum di MI Darul Hikmah dimulai dengan penyusunan rencana anggaran yang komprehensif, yang melibatkan berbagai pihak penting, termasuk kepala madrasah, guru, komite madrasah, dan yayasan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana, MI Darul Hikmah mencatat semua sumber dana yang masuk, baik dari pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun infak dan sumbangan dari siswa, dengan cermat oleh bendahara madrasah. Setiap transaksi dicatat secara rinci dan dikelompokkan berdasarkan jenis pengeluaran. Proses evaluasi pengelolaan pendidikan di MI Darul Hikmah melibatkan dua aspek penting, yaitu evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh kepala madrasah dan yayasan. Di sisi lain, evaluasi eksternal dilakukan oleh Kementerian Agama setempat, yang memfokuskan perhatian pada penggunaan dana BOS yang diterima.

DAFTAR REFERENSI

- Aziz, M. Z. (2018). *Implementasi manajemen keuangan pendidikan di Rumah Gemilang Indonesia Sawangan Depok*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (1993). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Budaya, B. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar yang efektif. *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 18(1).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah: Buku 3 panduan monitoring dan evaluasi* (keempat). Depdiknas Didasmen Direktorat SLTP.
- Fatah, N. (2012). *Standar pembiayaan pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Fatah, N. (2017). *Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis aktivitas pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Rineka Cipta.

- Fattah, N. (2004). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (n.d.). *Panduan praktis penelitian kualitatif*. Graha Ilmu.
- Gufron, M. (2022). *Strategi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan efektivitas keuangan di MA Noer Fadilah Sumber Panjalin Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan*. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Handoko, T. H. (2013). *Manajemen*. BPFE.
- Ilma, U. (2015). Akuntabilitas keuangan sekolah berbasis audit keuangan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 24(6).
- Indonesia, T. D. A. P. U. P. (2009). *Manajemen pendidikan*. Alfabeta.
- Kuniawan, W., Wibowo, A., & dkk. (n.d.). *Manajemen keuangan SMK*. Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud.
- Machali, I., & Hidayat, A. (2016). *The handbook of education management: Teori dan praktik pengelolaan sekolah/madrasah di Indonesia*. Kencana.
- Marno, & Supriyanto, T. (2008). *Manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam*. PT Refika Aditama.
- Masditou. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan menuju pendidikan yang bermutu. *Jurnal Ansiru PAI*, 1(2).
- Moloeng, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2005). *Manajemen berbasis sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2016). *Konsep pembiayaan pendidikan*. Ar-Ruuz Media.
- Munir, M., & Fanan, M. A. (2020). Manajemen keuangan dan pembiayaan di SDN Sarirogo Sidoarjo. *Edusiana: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 7(2).
- Mustari, M. (2015). *Manajemen pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Nugrahani, F. (n.d.). *Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan bahasa*. Cakra Books.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*.
- Rahmatullah. (2020). *Manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MA Darussalam Deru Bojonegoro*. Digilib UINSA.
- Sobry, S. M. (2012). *Manajemen pendidikan*. Lombok: Holistica.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Pustaka Pelajar.
- Zahro, A. (2014). *Total quality management (teori & praktik manajemen untuk mendongkrak mutu pendidikan)*. Ar-Ruzz Media.